



Dana KJP Sebesar Rp 2,2 Triliun

Balai Kota, Warta Kota

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 2,2 triliun dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Ada kenaikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp 700 miliar.

Arie Budiman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengatakan, Dinas Pendidikan terus melakukan verifikasi data penerima KJP agar tidak salah sasaran dalam penyaluran dana itu.

Jumlah pelajar yang sudah mendaftar untuk menerima dana KJP tahun 2015 sebanyak 39.850 orang. Tahun ini dana KJP diberikan kepada pelajar sekolah negeri dan swasta. Sebelumnya penerima KJP hanya pelajar yang bersekolah di sekolah negeri.

"Ada syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi. Siswa juga harus berperilaku yang baik dan orangtuanya harus tahu," kata Arie di Balai Kota, Senin (12/1).

Dana yang diberikan kepada para peserta didik di sekolah negeri tidak berubah, sedangkan sekolah swasta mendapatkan dana lebih besar. Dana KJP bagi pelajar sekolah swasta lebih besar karena sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP).

Penyaluran dana KJP kepada sekolah swasta sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk sekolah swasta masih dirapatkan dananya, dan diperkirakan akan menerima Rp 700.000 sampai Rp 900.000.

"Penyaluran tiga bulan sekali. Mekanismenya masih sama. Hanya kami harus meningkatkan ketelitian untuk meningkatkan kehati-hatian," kata Arie.

Prioritas

Sementara itu, Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, mengatakan,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencairkan dana KJP setelah APBD DKI 2015 diketuk. Dana KJP merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"KJP itu dana hibah jadi harus segera dicairkan kalau APBD DKI 2015 sudah diketuk. Kemarin lama pencairannya karena data dari Dinas Pendidikan belum sampai ke kami saat verifikasi," kata Heru.

Dipantau

Sementara itu, Fahmi Zulfikar, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan, akan mengundang Dinas Pendidikan untuk membahas dana KJP. Tujuannya



Dana KJP

- SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat Rp 210.000.
- SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat Rp 220.000-Rp 250.000.
- SMA dan SMK, Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat Rp 400.000-Rp 450.000.
- Syarat penerima KJP: tidak merokok, tidak membolos, tidak tergabung geng, tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki motor, tidak memiliki kontrakan, mobil, usaha (toko besar), dan tidak membuat data palsu.

agar KJP dapat dinikmati seluruh siswa dari golongan keluarga tidak mampu.

"Seluruh pendistribusian kartu KJP akan kami awasi ketat. Jangan sampai muncul kecurangan di tengah jalan," kata Fahmi. (m1/bin)